

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG  
DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE PARK  
DESA PASAR BANGGI**



Dina Eka Anggraini, Herbasuki Nurcahyanto, Dewi Rostyaningsih

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Mangrove Park Ecotourism in Pasar Banggi Village is a conservation-based tourist attraction in Rembang Regency. Since the Covid-19 pandemic, the existence of this tourist spot has diminished. This has also led to the neglect of the facilities. Additionally, there are other untapped potentials in the creative economy sector, which have not gained attention from the government. As the leading sector in local tourism affairs, the involvement of the Department of Culture and Tourism of Rembang Regency is needed to address the issues at hand. This study aims to describe the role of the Department of Culture and Tourism of Rembang Regency in the Development of Mangrove Park Ecotourism in Pasar Banggi Village and examine the supporting and inhibiting factors. The study utilizes Biddle and Thomas' role theory combined with Jim Ife and Frank Tesoriero's theories to delineate the role of the Department of Culture and Tourism of Rembang Regency in the development of Mangrove Park Ecotourism in Pasar Banggi Village. This research adopts a descriptive qualitative research method. The findings indicate that there are still roles that are not optimally performed, particularly in facilitative and educational roles, which are caused by role transitions and limited budgets. Recommendations include collaboration between the Department of Culture and Tourism of Rembang Regency and the Village Community Empowerment Agency to empower the communities around the Mangrove Park Ecotourism area in Pasar Banggi Village. Furthermore, cooperation with private entities such as accommodation providers can enhance the development of Mangrove Park Ecotourism in Pasar Banggi Village.*

**Keywords:** *Role, Development, Ecotourism*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara di bagian tenggara Benua Asia yang sering disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga terdiri dari hamparan lautan yang sangat luas daripada bagian daratannya. Dengan adanya kondisi tersebut, menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam berupa dikelilingi oleh garis pantai yang membentang luas sehingga memunculkan ekosistem daerah pesisir pantai.

Wilayah pesisir pantai yang tidak hanya menyimpan keindahan alam tetapi juga terdapat banyak jenis flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari penduduk setempat di sekitar pantai. Banyaknya sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir pantai juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian.

Salah satu pemanfaatan kekayaan alam di daerah pesisir selain memanfaatkannya untuk kebutuhan masyarakat adalah dengan mengembangkannya sebagai sebuah objek wisata yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung. Pengembangan kegiatan

kepariwisataan di daerah pesisir ini dapat diwujudkan dalam suatu agenda yang dapat diupayakan untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Menurut Gamal (2004: 3), Berpariwisata mengacu pada tindakan suatu individu atau sekelompok orang yang sementara meninggalkan kediamannya untuk berkunjung ke lokasi lain di luar wilayah rumah mereka. Motivasi perjalanan dapat bervariasi, mencakup berbagai aspek kesehatan, agama, politik, sosial budaya ekonomi, kesehatan dan lainnya seperti rasa ingin tahu, merasakan pengalaman baru, dan bertujuan untuk pembelajaran. (Tjitrawati et al., 2022)

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan pesisir pantai di bagian utaranya. Luasnya kawasan pesisir pantai ini mendukung lahirnya berbagai objek wisata yang mengusung tema pariwisata bahari. Dengan munculnya berbagai objek wisata tersebut akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rembang. Tentunya, hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang. Berdasarkan data yang peneliti temukan, akumulasi kunjungan dari wisatawan di Kabupaten Rembang menempati peringkat

sepuluh besar bersama dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah pada kurun waktu 2020 - 2022.

**Tabel 1. Sepuluh Kabupaten/Kota yang Memiliki Akumulasi Kunjungan Wisatawan Tertinggi di Jawa Tengah (2020-2022)**

Kab/Kota	2020	2021	2022	JML
Klaten	1.174.978	1.628.177	4.816.082	<b>7.619.237</b>
Semarang Kab	3.266.931	2.670.358	57.833	<b>5.995.122</b>
Temanggung	223.805	254.969	5.343.151	<b>5.821.925</b>
Banyumas	1.325.806	1.498.236	2.626.837	<b>5.450.879</b>
Magelang Kab	1.450.347	863.857	2.593.175	<b>4.907.379</b>
Tegal Kab	427.526	431.523	3.810.858	<b>4.669.907</b>
Semarang Kota	1.841.669	1.285.587	1.241.210	<b>4.368.466</b>
Rembang	854.104	871.136	2.249.579	<b>3.974.819</b>
Banjarnegara	937.404	1.167.841	1.748.969	<b>3.854.214</b>
Purbalingga	1.376.315	1.061.332	1.038.069	<b>3.475.716</b>

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2022 & Diolah oleh peneliti.

Tingginya kunjungan wisatawan di Kabupaten Rembang melonjak pada tahun 2022 yang merupakan masa setelah adanya pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam sektor pariwisata.

Salah satu objek wisata yang terletak di Kabupaten Rembang yang mana

mengoptimalkan kawasan pesisir pantai sebagai daya tariknya adalah Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi merupakan kawasan hutan *mangrove* di Desa Pasar Banggi yang kemudian dikembangkan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagai pariwisata. Pemanfaatan ini tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian.

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang idealnya juga memiliki kewenangan untuk mengurus segala urusan daerah termasuk di sektor pariwisata. Dalam hal ini, kewenangan yang dimaksud berupa menggali dan mengembangkan lebih jauh potensi pariwisata di wilayahnya. Begitu juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Rembang yang berusaha mengembangkan berbagai potensi dari kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan: a) menyusun dan menetapkan rencana induk

pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota; b) menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota; c) menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/ kota; d) menerbitkan Perizinan Berusaha; e) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di wilayahnya; f) memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya; g) memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru; h) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i) memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya; j) Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata. Oleh karena itu, dalam situasi pengembangan pariwisata daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memainkan peran penting termasuk dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Berdasarkan temuan peneliti, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi masih belum optimal. Salah satunya dalam mempromosikan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana strategi yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Rembang melalui media sosial. Promosi melalui media sosial merupakan hal yang potensial untuk dilakukan di masa sekarang karena dapat menjangkau pengguna yang lebih luas daripada menggunakan metode promosi yang masih konvensional. Oleh karena itu, promosi di media sosial tentu harus memerlukan strategi yang tepat untuk menarik perhatian pengguna media sosial.

Peneliti menemukan data dari berbagai akun media sosial resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, pemasaran daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Rembang sudah dilakukan tetapi belum mendapat jangkauan yang luas. Kurang luasnya jangkauan pemasaran di media sosial yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dilatarbelakangi dengan jumlah pengikut yang tidak banyak seperti di akun

Instagram dan X (sebelumnya bernama Twitter).



**Gambar 1. Akun Instagram Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang**

Sumber: Peneliti, 2023.



**Gambar 2. Akun X (Twitter) Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang**

Sumber: Peneliti, 2023.

Selain sedikitnya jumlah pengikut, publikasi rutin melalui media sosial juga dapat menjadi bentuk keaktifan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan promosi melalui media sosial. Promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang hanya berupa publikasi rutin melalui akun Instagram saja. Sedangkan di

akun lain seperti X dan halaman di Facebook sudah tidak ada unggahan terbaru. Masing-masing unggahan terbaru pada bulan September 2023 dan Oktober 2022.



**Gambar 3. Unggahan Terbaru di Akun X (Twitter) Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang**

Sumber: Peneliti, 2023.



**Gambar 4. Unggahan Terbaru di Akun Halaman Facebook Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang**

Sumber: Peneliti, 2023.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: “(i) pemerintah kabupaten/kota berwenang memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya”. Demikian pula dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memelihara daya tarik wisata yang masih terletak di wilayah Kabupaten Rembang termasuk Ekowisata *Mangrove Park* Pasar Banggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Peneliti menemukan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi kurang memperhatikan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang ada di sana. Hal ini terlihat pada kondisi beberapa fasilitas dan bangunan jembatan yang mengalami kerusakan. Seperti kursi yang rusak, jembatan yang kayunya sudah rapuh dan berlubang, fasilitas spot foto yang rusak, dan lain sebagainya.



**Gambar 5. Area Jembatan Ditutup karena Kayunya Rapuh**

Sumber: Peneliti, 2023.



**Gambar 6. Beberapa Bagian Jembatan Berlubang**

Sumber: Peneliti, 2023.



**Gambar 7. Karpet di Salah Satu Spot Foto Rusak dan Kotor**

Sumber: Peneliti, 2023.



**Gambar 8. Kursi dari Kayu yang Hanya Tersisa Penyangganya**

Sumber: Peneliti, 2023.

Kerusakan beberapa fasilitas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para wisatawan. Sehingga dapat berimbas pada menurunnya kunjungan wisatawan. Sebaliknya, fasilitas yang terawat akan memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan sehingga akan

lebih berlama-lama di kawasan wisata. Hal tersebut juga dapat memberikan peluang bagi wisatawan untuk berkunjung kembali.

Di sisi lain, letak Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi yang berada di daerah pesisir pantai dan tanah berlumpur, membuat kawasan ini kaya akan hasil laut yang dapat dimanfaatkan sebagai olahan untuk dijual. Beberapa diantaranya adalah kepiting *mangrove*, udang, kerang, tiram, hingga ikan bandeng. Namun, peneliti menemukan bahwa olahan yang dibuat oleh masyarakat sekitar masih menggunakan metode-metode yang sederhana dan cenderung kurang menarik. Pengolahan hasil laut hanya sebatas dijadikan sebagai hidangan siap santap tanpa atau dengan kemasan yang sederhana.



**Gambar 9. Olahan Hasil Laut di Kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi**

Sumber: *Website* Jembatan Merah, 2020.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbup Nomor 56 Tahun

2021 Pasal 19 poin (i) Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas untuk melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, hingga pendampingan sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif. Dengan demikian, dibutuhkan adanya realisasi berdasarkan poin di peraturan tersebut dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melalui Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu untuk memberikan perhatian terhadap berbagai potensi ekonomi kreatif yang ada di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Berdasarkan penggambaran situasi serta kondisi dari permasalahan dan berbagai temuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi**”.

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Administrasi Publik**

Maksudi (2017), menyimpulkan pertamanya bahwa administrasi publik adalah suatu proses di mana tenaga kerja dan sumber daya lainnya (seperti model, fasilitas, dan teknologi) diatur (organisasi), dikelola (fungsi manajemen) untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, Administrasi Publik merupakan kombinasi seni dan ilmu. Sebagai seni (*art*), Administrasi Publik melibatkan keterampilan praktis dalam mengelola hubungan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu (*science*), Administrasi Publik berusaha memecahkan masalah-masalah publik.

Administrasi publik dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian proses kerjasama yang rasional yang dilakukan oleh aparatur negara/pemerintah. Dalam konteks ini, sumber daya dan personel publik diatur dan dikoordinasikan untuk melaksanakan kebijakan yang mencerminkan tujuan negara serta memenuhi berbagai kebutuhan publik.

## **B. Peran**

Menurut Poerwodarminta dalam Hartono dan Safitri (2019) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan tingkah laku yang diharapkan atau dimiliki oleh orang, atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224) menjelaskan bahwa peran

adalah sekumpulan formulasi yang mengatur perilaku yang diharapkan dari individu dengan posisi tertentu (Hia, 2019).

## **C. Peran Pemerintah**

Menurut Muhtar Haboddin (dalam Alfianto dan Fauzi, 2021:7), peran pemerintah merujuk pada semua aktivitas yang terkoordinasi, bersumber pada kedaulatan, dan didasarkan pada landasan negara yang terkait dengan rakyat dan wilayah negara untuk mencapai tujuan negara. (Ayuningtyas et al., 2023)

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 558- 613) mengidentifikasi beberapa indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok atau individu dalam sebuah organisasi. Fokusnya adalah pada peran pemerintah sebagai pekerja masyarakat, yang melibatkan empat peran kunci: peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis. (Cahyani et al., 2021)

- a. Peran Fasilitatif: Diperuntukkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, dan menghargai kontribusi individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan produktivitas.
- b. Peran Edukasi: Terlibat dalam menyusun agenda, tidak hanya membantu pelaksanaan peningkatan produktivitas, tetapi juga aktif memperluas pengetahuan, keterampilan,

dan pengalaman individu serta kelompok masyarakat.

- c. Peran Representasional: Melibatkan interaksi dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan luas, membuka jaringan, mengembangkan hubungan, dan mendorong partisipasi dalam mengembangkan potensi.
- d. Peran Teknis: Menyangkut kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan teknologi informasi, membuat presentasi, mengelola keuangan, dan melakukan penilaian kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan orang, kelompok, dan komunitas.

#### **D. Pariwisata**

Pariwisata menurut Spillane (1987: 20) adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan/keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah aktivitas perjalanan sementara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan untuk mencari keseimbangan, keserasian,

kebahagiaan, dan pengalaman baru dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, alam, dan ilmu pengetahuan.

#### **E. Ekowisata**

Ekowisata secara konseptual adalah pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sementara itu, ditinjau dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Isa Wahyudi, 2019).

#### **F. Pengembangan Ekowisata**

Menurut Abdoellah et al. (2020), pengembangan ekowisata merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya.

Ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan terhadap lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekowisata adalah proses terencana yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan produk pariwisata dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan ekowisata melibatkan upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek ekologi dan keberlanjutan ke dalam pengelolaan destinasi pariwisata, dengan tujuan menciptakan pengalaman wisata yang ramah lingkungan, ekonomis, dan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mendapatkan dan menjelaskan gambaran rinci tentang objek penelitian atau keadaan yang sedang diamati. Menurut Sugiyono (2013: 205) dalam penelitian kualitatif, "masalah" yang dihadapi peneliti masih belum sepenuhnya terungkap, bahkan dapat dikatakan kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, "masalah" dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, bersifat tentatif, dan mungkin akan mengalami perkembangan atau perubahan setelah peneliti terjun ke lapangan.

Data primer dalam penelitian ini mencakup jawaban informan terkait peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, publikasi, bahan bacaan internet, dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang diambil oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono (2013: 225) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam situasi alamiah (*natural setting*), menggunakan sumber data primer, dan lebih banyak menggunakan teknik observasi berpartisipasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi**

#### **1. Peran Fasilitatif**

Jim Ife & Frank Tesoriero (2008: 558-559) menyatakan bahwa dalam peran fasilitatif,

pemerintah sebagai pekerja masyarakat melakukan berbagai strategi untuk memudahkan suatu proses yang efektif agar dapat mempercepat aksi dan membantu kelancaran proses dalam memberdayakan masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang telah melakukan strategi-strategi agar pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi agar dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Melalui diskresi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memudahkan diakuinya legalitas Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi sebagai daya tarik wisata berbasis konservasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berupaya untuk memperindah Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi agar dapat menarik minat wisatawan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang juga telah melakukan pemasaran melalui promosi menggunakan berbagai media seperti buku profil pariwisata, aplikasi *Enjoy Rembang* serta melalui acara-acara dengan melibatkan pengelola wisata di Kabupaten Rembang termasuk Kelompok Tani Sido Dadi Maju.

Namun, dalam keberjalanan peran fasilitatif ini, ditemukan kendala yaitu keterbatasan anggaran. Sebagaimana yang peneliti kutip dari *website* [inspirasi.com](http://inspirasi.com), Pemerintah Kabupaten

Rembang mengalami defisit anggaran pada tahun 2023. Hal ini berdampak pada adanya refocusing anggaran di tiap-tiap instansi pemerintah yang berimbas pula terhadap beberapa program di tiap-tiap instansi yang berhenti bahkan tidak dapat terealisasi termasuk pembangunan *masterplan* Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

## 2. Peran Edukasi

Jim Ife & Frank Tesoriero (2008:580-581) menyatakan bahwa dalam peran edukasi yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pekerja masyarakat diklasifikasikan sebagai peran mendidik. Dengan kata lain, pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan kemampuan mendidik ini, pemerintah harus memiliki kompetensi untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga di kemudian hari, hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam hal pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi, peran edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang berupa mendorong peningkatan keterampilan pengelola

Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi dan mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Tetapi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang belum berperan untuk mendidik atau memberikan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya transisi jabatan dari Sub Koordinator Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbup Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 19 poin (i) Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas untuk melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, hingga pendampingan sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif. Namun, belum ada pengembangan potensi ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

### **3. Peran Representasional**

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 591-592) menyatakan bahwa dalam peran representasional, pemerintah sebagai pekerja masyarakat melakukan berbagai strategi untuk dapat membentuk hubungan dengan berbagai jaringan yang lebih luas

dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melakukan peran-peran representasional berupa menginisiasi kemitraan dengan pihak-pihak lain untuk mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi dan menyusun rencana strategis bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Peran dalam menginisiasi kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi sudah dilaksanakan dengan optimal melalui kerja sama antar instansi setara yang membawahi urusan pariwisata yaitu PAKUJEMBARA (Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora) dan RATUBANGNEGORO (Blora, Tuban, Rembang, dan Bojonegoro).

Peran dalam menyusun rencana strategis bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi sudah dilaksanakan dengan optimal melalui kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, dan PT Perusahaan Listrik Negara.

Peran representasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang mendorong untuk terciptanya

suatu hubungan dengan pihak lainnya. Hal ini tentu membutuhkan kemampuan berkomunikasi untuk melakukan koordinasi yang baik agar penyampaian maksud dan tujuan dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak tersebut. Sebagaimana teori dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 599) yang mengatakan bahwa pekerja masyarakat akan sering terlibat dalam komunikasi dengan berbagai pihak. Bagian dari peran ini adalah kemampuan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam melakukan presentasi kepada publik.

#### **4. Peran Teknis**

Peran teknis pada kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mengumpulkan dan menganalisis data seputar perkembangan urusan pariwisata daerah termasuk di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam melakukan pengolahan data ini dengan tujuan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi semaksimal mungkin.

Berdasarkan pendapat Horton & Hunt (1999) dalam Ekarishanti & Kismartini (2019), kompetensi, diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan peran pada

sejumlah perilaku yang saling berkaitan. Lebih lanjut, Jim Ife & Frank Tesoriero (2008: 608-609) menyatakan bahwa sebagai seorang pekerja masyarakat penting baginya untuk memiliki keterampilan menggunakan komputer. Penggunaan komputer merupakan bagian penting dari strategi pengembangan masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan komputer bukan hanya terbatas pada pemakaian suatu perangkat. Secara lebih luas, penggunaan komputer diartikan pula sebagai penggunaan teknologi. Dapat dilihat pada kemampuan para pegawai yang menangani urusan kepariwisataan dalam melakukan proses monev rutin setiap tahunnya. Meskipun terdapat kendala pada anggaran, proses monev tetap dapat dijalankan dengan memanfaatkan teknologi atau melalui sambungan telepon. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga digunakan dalam menghimpun berbagai data terkait urusan kepariwisataan di Kabupaten Rembang termasuk di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Kompetensi**

Kompetensi pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam memanfaatkan teknologi dan komputer mendukung pelaksanaan peran teknis yang terdapat perubahan sistem monev yang awalnya dilakukan secara langsung (luring) menjadi tidak langsung (daring) sampai ke pelaporannya dalam bentuk LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

#### **b. Koordinasi**

Koordinasi yang terjalin dengan optimal antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dengan instansi setara di luar daerah yaitu PAKUJEMBARA (Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora) dan RATUBANGNEGORO (Blora, Tuban, Rembang, dan Bojonegoro) serta instansi di dalam daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang & Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang) mendukung pelaksanaan peran representasional.

#### **c. Diskresi**

Diskresi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam mendukung legalitas pengelolaan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi oleh Kelompok Tani Sido Dadi Maju mendukung pelaksanaan peran fasilitatif dalam memfasilitasi perizinan pariwisata.

## **2. Faktor Penghambat**

#### **a. Role Transition**

Transisi jabatan yang terjadi pada Sub Koordinator Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif menyebabkan belum terlaksananya peran edukasi dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

#### **b. Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menyebabkan belum optimalnya peran fasilitatif dalam meningkatkan fasilitas dan daya tarik Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

## **KESIMPULAN**

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi sudah optimal namun masih terdapat peran yang mengalami kendala yaitu peran fasilitatif dan peran edukasi. Peran fasilitatif yang belum dijalankan dengan optimal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dalam meningkatkan fasilitas dan daya tarik Ekowisata *Mangrove Park* melalui *masterplan* pembangunan jembatan. Sedangkan peran edukasi yang belum dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Rembang adalah dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi.

Faktor pendukung peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi meliputi kompetensi, koordinasi, dan diskresi. Dengan adanya kompetensi dari pegawai dalam memanfaatkan teknologi, kegiatan *monev* yang terkendala oleh keterbatasan anggaran dapat tetap dilakukan secara daring. Dengan adanya koordinasi, dapat memperluas jaringan kerja dalam pemasaran wisata dan menyusun strategi bersama instansi terkait dalam rangka mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi dengan tetap memperhatikan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi. Dengan adanya diskresi, pengelolaan Ekowisata *Mangrove Park* oleh Kelompok Tani Sido Dadi Maju dapat menjadi legal dan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Faktor penghambat peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam Pengembangan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi meliputi *role transition* dan keterbatasan anggaran. *Role transition* menghambat peran edukasi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Rembang dilihat dari adanya transisi jabatan Sub Koordinator Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif yang masih memerlukan adanya adaptasi mengenai tugas dan fungsinya, dalam hal ini adalah pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi. Adanya keterbatasan anggaran menghambat peran fasilitatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam merealisasikan *masterplan* pembangunan jembatan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengenai adanya *role transition* yang menghambat peran edukasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yaitu peran dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif di Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi, maka peneliti memberi saran agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang untuk dapat bersama-sama memberdayakan masyarakat setempat terkait pengembangan potensi ekonomi kreatif

yang ada di kawasan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi

2. Mengenai keterbatasan anggaran yang menghambat peran fasilitatif dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, maka peneliti menyarankan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memperluas kemitraan atau kerja sama dengan pihak swasta seperti penyedia jasa penginapan dalam mengembangkan Ekowisata *Mangrove Park* Desa Pasar Banggi agar dapat dilakukan secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., -, S., Widianingsih, I., Cahyandito, M. F., Wiyanti, D. T., & Nurseto, H. E. (2020). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Tarumajaya, Hulu Sungai Citarum: Potensi dan Hambatan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 236. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i3.24553>
- Angela, V. F. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 984–993. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/24980>
- Angraeni, C., Erina, L., & Effendi, S. (2020). Prinsip-Prinsip Anggaran Publik pada Organisasi Publik di Era Pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.9>
- Awalla, Y., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2018). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21141/20851>
- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & ... (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 1–19. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39400%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/39400/29188>
- Cahyani, M. E., Sulandari, S., & Hariyani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 1–14.
- Ekarishanti, C., & Kismartini. (2019). Voluntary Instrument pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4), 1–15.
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35–51.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Lailiyah, N., & Sanjoto, B. T. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Wisatawan di Ekowisata Hutan Mangrove Desa Pasarbanggi Kabupaten Rembang. *Edu Geography*, 9(2), 152–160.
- Lestari, D. (2021). Pengaruh Adaptasi Karir terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(4), 1319–1330.

- <https://doi.org/10.26740/jim.v9n4.p1319-1330>
- Lestariningsih, S. P., Uthari, S., & Mayang, N. (2023). Pemanfaatan Tanaman Mangrove sebagai Bahan Ecoprint di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 115–124.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Rajawali Pers.
- Mulyana, N., & Asiah, D. H. S. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Berencana. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 93. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14216>
- Mustamu, J. (2011). Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *Sasi*, 17(2), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Prastiyono, V. I., Maesaroh, & Widowati, N. (2021). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 240–258.
- Rahayuliana, R., & Watini, S. (2022). Implementasi Reward Asyik Untuk Meningkatkan Minat Belajar Anak di RA Nurul Hidayah Batam. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 1659. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.1659-1666.2022>
- Rahmawati, S. W., Sunarti, & Hakim, L. (2017). PENERAPAN SAPTA PESONA PADA DESA WISATA (Analisis Persepsi Wisatawan atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 50(2), 195–202. <https://media.neliti.com/media/publications/187115-ID-penerapan-sapta-pesona-pada-desa-wisata.pdf>
- Rusdina, I., & Sokardjo, D. (2018). Pengaruh Koordinasi terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 1(221), 28–36.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. 252.
- Tjitrawati, A. T., Amalia, R., & Hamdan, F. Z. Z. (2022). Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. *Media Iuris*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33353>
- Wahyuni, A. P., Yonvitner, & Setyobudiandi, I. (2017). Daya Dukung Kawasan Pantai Timur Kabupaten Bulukumba untuk Aktivitas Wisata Bahari. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 9(1), 135–150.
- Wolah, F. F. C. (2016). Peranan Promosi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Poso. *Jurnal Acta Diurna*, 5(2), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11722>

#### Sumber-sumber Internet:

- Berita3rembang.wordpress.com. (2011). Peta Rembang. Diakses pada 6 November 2023, dari <https://berita3rembang.wordpress.com/2011/12/11/peta-rembang/>.
- Dinbudpar.rembangkab.go.id. (). Peta Pariwisata Kabupaten Rembang. Diakses pada 4 November 2023, dari <https://dinbudpar.rembangkab.go.id/peta-pariwisata/>.

- Dinbudpar.rembangkab.go.id. (). Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Diakses pada 4 November 2023, dari <https://dinbudpar.rembangkab.go.id/visi-dan-misi/>.
- Dindukcapil.rembangkab.go.id. (2022). Jumlah Penduduk Per Kecamatan Sem 2 Tahun 2022. Diakses pada 4 November 2023, dari [http://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/jumlah\\_penduduk/202202](http://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/jumlah_penduduk/202202).
- Jmmangrovepasarbanggi.com. (2020). Jembatan Merah. Diakses pada 12 Oktober 2023, dari <https://jmmangrovepasarbanggi.com/jembatan-merah/>
- Rembangkab.go.id. (2022). Sah, Rembang Kini Miliki 12 Desa Wisata Baru. Diakses pada 16 Desember 2023, dari <https://rembangkab.go.id/berita/sah-rembang-kini-miliki-12-desa-wisata-baru/>
- Inspirasiline.com. (2023). Imbas Defisit APBD, Anggaran OPD di Rembang Dipangkas Hingga 70 Persen. Diakses pada 22 Desember 2023, dari <https://www.inspirasiline.com/2023/08/19/imbas-defisit-apbd-anggaran-opd-di-rembang-di-pangkas-hingga-70-persen/>
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2020). *RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026*.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2021). *Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang*.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. (2022). *Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2022 Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial*.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Pemerintah Republik Indonesia, 016496, 1–1117*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>

## Dokumen Pemerintah

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021*.
- Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan P. P. J. T. (2022). *Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka 2022*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah*.